

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia

Muhammad Ferdiansyah Saputra

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: muhammadferdiansyahsaputraa@Gmail.Com

Kata Kunci:

Demokrasi, kepercayaan publik, partisipasi politik, reformasi, tata kelola pemerintahan.

Keywords:

Democracy, public trust, political participation, reform, governance.

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Namun, dalam perkembangannya, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan berupa menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan praktik demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji strategi yang dapat dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan sumber relevan yang berkaitan dengan demokrasi dan kepercayaan publik. Hasil

kajian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan terhadap demokrasi ditandai oleh meningkatnya apatisisme politik, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga negara, serta meningkatnya polarisasi sosial dan politik. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain korupsi, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, penyebaran disinformasi, serta ketimpangan sosial-ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, reformasi lembaga politik dan hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan pendidikan politik dan literasi digital, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, pemulihan kepercayaan publik menjadi langkah penting dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.

ABSTRACT

Democracy is a system of government that places the people as the highest holders of sovereignty in state administration. However, in its development, Indonesian democracy faces significant challenges, particularly the declining level of public trust in democratic institutions and practices. This study aims to analyze the condition of the public trust crisis in Indonesian democracy, identify its contributing factors, and examine strategies to restore public confidence. The research employs a library research method by reviewing various academic journals, books, and other relevant literature related to democracy and public trust. The findings indicate that the crisis of trust is characterized by increasing political apathy, declining confidence in state institutions, and growing social and political polarization. The factors contributing to this condition include corruption, vote-buying practices, abuse of power, weak law enforcement, the spread of misinformation and disinformation, and socio-economic inequality. To address these challenges, efforts are needed to strengthen governmental transparency and accountability, reform political and legal institutions, combat corruption, improve political education and digital literacy, and expand public participation in democratic processes. Therefore, restoring public trust is a crucial step toward building a more inclusive, accountable, and high-quality democracy in Indonesia.



Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi telah menjadi pilihan konstitusional yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak era Reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami berbagai perhamkembangan demokrasi, mulai dari pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hingga penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Berbagai capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam proses demokratisasi yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif (Noviati, 2013).

Perjalanan demokrasi Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang berpotensi mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri. Salah satu persoalan yang semakin mendapat perhatian adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik demokrasi dan institusi-institusi yang menjalankannya. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap politik, rendahnya partisipasi dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik, serta berkembangnya pandangan bahwa demokrasi belum mampu memberikan solusi yang efektif terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan hukum yang dihadapi Masyarakat (Törnquist et al., 2009).

Krisis kepercayaan terhadap demokrasi muncul akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Praktik korupsi yang masih terjadi di kalangan pejabat publik, maraknya politik uang dalam pemilihan umum, penyebaran disinformasi melalui media digital, polarisasi politik yang tajam, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran demokrasi menjadi beberapa penyebab utama menurunnya kepercayaan publik. Selain itu, banyak masyarakat yang merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi secara optimal dalam proses perumusan kebijakan publik. Hal ini memunculkan persepsi bahwa demokrasi hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara kepentingan rakyat belum sepenuhnya menjadi prioritas (Fadhlurrahman, 2024).

Permasalahan krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji karena kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan sistem demokrasi. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, legitimasi lembaga-lembaga negara dapat melemah, partisipasi politik menurun, dan stabilitas sosial-politik menjadi rentan terhadap berbagai konflik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mendorong munculnya kecenderungan masyarakat untuk mendukung sistem pemerintahan yang kurang demokratis dengan harapan memperoleh stabilitas dan efektivitas yang lebih tinggi (Iqbal et al., 2025).

Selain berdampak pada aspek politik, krisis kepercayaan terhadap demokrasi juga berpengaruh terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Kepercayaan publik yang rendah dapat menghambat implementasi kebijakan pemerintah, memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi efektivitas program-program pembangunan. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap

demokrasi, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia (Arianto et al., 2025).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia, mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya krisis kepercayaan tersebut, serta merumuskan solusi dan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga negara, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap demokrasi (Alisya et al., 2025).

Pentingnya penelitian ini mengenai krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia terletak pada pentingnya menjaga keberlangsungan sistem demokrasi sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia serta menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya mampu bertahan secara prosedural, tetapi juga dapat berkembang secara substantif sehingga memperoleh legitimasi dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat (Ferdinan, 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian mengenai krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memahami berbagai persoalan yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga yang menjalankannya. Kajian ini akan membahas kondisi krisis kepercayaan yang terjadi di tengah masyarakat, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dampaknya terhadap kehidupan politik dan stabilitas nasional, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan demokrasi di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat (Ginting et al., 2025).

Pembahasan

Kondisi dan Indikator Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Demokrasi Indonesia

Demokrasi Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak bergulirnya Reformasi tahun 1998. Berakhirnya rezim Orde Baru membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, serta pelaksanaan pemilihan umum yang lebih terbuka dan kompetitif. Berbagai perubahan tersebut menjadi tonggak penting dalam proses demokratisasi Indonesia yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, setelah lebih dari dua dekade Reformasi berlangsung, muncul berbagai tantangan yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih

menghadapi sejumlah persoalan mendasar, salah satunya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi itu sendiri (Soleh, 2005).

Krisis kepercayaan terhadap demokrasi merupakan kondisi ketika masyarakat mulai meragukan kemampuan sistem demokrasi dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta pemerintahan yang bersih dan efektif. Fenomena ini semakin terlihat melalui berbagai sikap dan pandangan masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap praktik demokrasi yang berlangsung. Meskipun secara prosedural demokrasi tetap berjalan melalui pemilu yang rutin dan pergantian kekuasaan yang konstitusional, banyak masyarakat yang menilai bahwa demokrasi belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa (Esha, 2013).

Salah satu indikator yang menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap demokrasi adalah meningkatnya apatisme politik di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Apatisme politik ditandai dengan rendahnya minat masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik, baik dalam bentuk partisipasi dalam pemilu, diskusi publik, organisasi kemasyarakatan, maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa keterlibatan mereka dalam proses politik tidak akan membawa perubahan yang signifikan karena keputusan-keputusan penting tetap didominasi oleh kelompok elite politik. Akibatnya, muncul sikap acuh tak acuh terhadap berbagai proses demokrasi yang seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pembangunan negara (Rajif Al Fatakh, 2023).

Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara juga menjadi indikator penting dari krisis kepercayaan terhadap demokrasi. Lembaga-lembaga seperti parlemen, partai politik, birokrasi pemerintahan, dan bahkan lembaga penegak hukum sering kali mendapatkan kritik dari masyarakat terkait kinerjanya. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, praktik penyalahgunaan wewenang, serta konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan semakin memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap institusi demokrasi. Ketika lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat justru dianggap lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, maka kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi akan semakin melemah (Hanifah, 2025).

Hal tersebut juga diperkuat oleh persepsi bahwa proses politik sering kali tidak berjalan secara adil dan setara. Praktik politik uang dalam pemilihan umum masih menjadi persoalan yang sulit diberantas. Banyak masyarakat yang menilai bahwa keberhasilan seseorang dalam kontestasi politik lebih ditentukan oleh kekuatan modal dibandingkan kualitas, integritas, atau kapasitas kepemimpinannya. Situasi ini menimbulkan pandangan bahwa demokrasi telah mengalami distorsi karena tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan kepentingan politik tertentu (Zikri et al., 2025).

Indikator lain yang menunjukkan menurunnya kepercayaan terhadap demokrasi adalah meningkatnya polarisasi sosial dan politik di tengah masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai peristiwa politik nasional menunjukkan adanya pembelahan

yang cukup tajam berdasarkan preferensi politik, identitas agama, etnis, maupun kelompok sosial tertentu. Polarisasi ini diperparah oleh perkembangan media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, ruang publik sering kali dipenuhi oleh narasi kebencian, disinformasi, dan konflik antarkelompok yang dapat mengancam kohesi sosial. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk mencapai konsensus dan persatuan, melainkan sebagai arena pertarungan kepentingan yang memecah belah Masyarakat (Dharmawan et al., 2025).

Krisis kepercayaan terhadap demokrasi juga tercermin dari munculnya pandangan sebagian masyarakat yang mulai mempertanyakan efektivitas sistem demokrasi dalam menghasilkan pemerintahan yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Permasalahan seperti korupsi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya pelayanan publik sering kali dianggap sebagai bukti bahwa demokrasi belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata. Sebagian masyarakat bahkan mulai membandingkan demokrasi dengan sistem pemerintahan lain yang dianggap lebih tegas dan efektif dalam mengambil keputusan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap hasil yang dihasilkan oleh praktik demokrasi selama ini (Supriyadi, 2024).

Faktor-Faktor Penyebab Krisis Kepercayaan terhadap Demokrasi

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai persoalan yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Meskipun demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan sejak era Reformasi, berbagai permasalahan yang belum terselesaikan telah memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan kredibilitas sistem demokrasi. Ketika demokrasi dianggap tidak mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerintahan yang bersih, maka tingkat kepercayaan publik terhadap sistem tersebut cenderung mengalami penurunan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap demokrasi adalah masih tingginya praktik korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, anggota legislatif, kepala daerah, hingga aparat penegak hukum telah menimbulkan persepsi bahwa lembaga-lembaga demokrasi belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa para pejabat yang dipilih melalui mekanisme demokratis justru terlibat dalam praktik korupsi, maka kepercayaan terhadap demokrasi sebagai sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih akan semakin menurun (Haudhi, 2026).

Praktik politik uang dalam pemilihan umum juga menjadi faktor penting yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Politik uang terjadi ketika kandidat atau pihak tertentu memberikan imbalan berupa uang, barang, atau fasilitas kepada pemilih untuk memperoleh dukungan politik. Praktik ini merusak prinsip dasar demokrasi yang seharusnya menjamin kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara rasional dan independen. Politik uang menciptakan kesan bahwa

jabatan politik dapat diperoleh melalui kekuatan modal, bukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis terhadap hasil pemilu dan meragukan legitimasi para pemimpin yang terpilih.

Faktor berikutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat atau elite politik. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip checks and balances serta tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertujuan mempertahankan kekuasaan atau menguntungkan kelompok tertentu. Fenomena tersebut menimbulkan kesan bahwa demokrasi hanya menjadi alat bagi elite politik untuk memperkuat posisi mereka, sementara kepentingan masyarakat luas sering kali terabaikan. Kondisi ini semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan (Fahir, 2025).

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi penyebab penting menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam negara demokrasi, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekuatan politik seseorang. Namun kenyataannya, masyarakat masih sering menyaksikan adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Beberapa kasus hukum yang melibatkan tokoh berpengaruh sering dianggap tidak ditangani secara transparan atau memperoleh perlakuan yang berbeda dibandingkan masyarakat biasa. Persepsi mengenai ketidakadilan hukum tersebut menimbulkan keraguan terhadap komitmen negara dalam menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Maraknya disinformasi, hoaks, propaganda politik, dan manipulasi informasi melalui media digital telah menciptakan tantangan baru dalam kehidupan demokrasi. Informasi yang tidak akurat dapat memengaruhi opini publik, memperkuat polarisasi sosial, serta menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menjadi semakin sulit untuk memperoleh informasi yang objektif dan terpercaya mengenai berbagai isu politik. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan terhadap media, pemerintah, maupun institusi demokrasi lainnya yang dianggap gagal mengendalikan penyebaran informasi yang menyesatkan (Sevriandri et al., 2026).

Selain faktor politik dan hukum, ketimpangan sosial-ekonomi juga berkontribusi terhadap krisis kepercayaan terhadap demokrasi. Salah satu harapan utama masyarakat terhadap demokrasi adalah terciptanya kesejahteraan yang lebih merata melalui kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Ketika kesenjangan ekonomi masih tinggi dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja belum merata, sebagian masyarakat merasa bahwa demokrasi belum memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan mereka. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-ekonomi tersebut sering kali diterjemahkan sebagai kegagalan sistem demokrasi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurang optimalnya representasi aspirasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Demokrasi pada dasarnya

menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah seharusnya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, banyak kelompok masyarakat yang merasa bahwa aspirasi mereka kurang diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan. Beberapa kebijakan bahkan dianggap lebih mengakomodasi kepentingan kelompok elite politik atau ekonomi dibandingkan kepentingan publik secara luas. Ketika masyarakat merasa tidak didengar dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka kepercayaan terhadap sistem demokrasi akan semakin berkurang.

Rendahnya pendidikan politik masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk krisis kepercayaan terhadap demokrasi. Kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip demokrasi dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh propaganda, politik identitas, maupun informasi yang tidak benar. Kondisi ini tidak hanya menghambat partisipasi politik yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap manipulasi politik yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi demokrasi (Mulia, 2024).

Strategi Penguatan Demokrasi dan Pemulihan Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu fondasi utama yang menentukan keberlangsungan dan kualitas demokrasi. Tanpa adanya kepercayaan publik, proses demokrasi akan kehilangan legitimasi sehingga sulit mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang responsif, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperkuat demokrasi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga-lembaga negara di Indonesia (Sumitro & Yorman, 2024).

Salah satu strategi yang paling penting adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Akuntabilitas menuntut setiap pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat meningkat karena masyarakat merasa bahwa penyelenggaraan negara dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Nurhidayah & Wahjono, 2025).

Strategi berikutnya adalah melakukan reformasi terhadap lembaga-lembaga politik dan hukum. Reformasi kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, profesionalitas, dan integritas institusi yang menjadi pilar demokrasi. Partai politik perlu didorong untuk menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik secara lebih baik agar mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Lembaga penegak hukum harus diperkuat agar mampu menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Ketika lembaga politik dan hukum dapat bekerja secara efektif dan berintegritas, masyarakat akan lebih percaya bahwa demokrasi mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Pemberantasan korupsi juga merupakan langkah strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemulihan kepercayaan publik. Korupsi telah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Pemerintah perlu memperkuat sistem pencegahan dan penindakan korupsi melalui pengawasan yang ketat, peningkatan transparansi anggaran, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi akan menunjukkan bahwa negara serius dalam menjaga integritas pemerintahan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Peningkatan pendidikan politik masyarakat juga menjadi strategi yang sangat penting. Pendidikan politik bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, mekanisme demokrasi, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi politik yang baik akan lebih mampu menilai informasi secara kritis, mengawasi jalannya pemerintahan, serta berpartisipasi secara konstruktif dalam proses demokrasi. Pendidikan politik yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan budaya demokrasi yang sehat dan memperkuat hubungan antara masyarakat dengan institusi negara (Prayugo & Prayitno, 2022).

Peningkatan literasi digital juga menjadi kebutuhan yang mendesak. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Kemajuan tersebut juga membawa risiko berupa penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang dapat merusak kualitas demokrasi. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memverifikasi informasi, memahami sumber informasi yang kredibel, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Literasi digital yang baik akan membantu masyarakat mengambil keputusan politik berdasarkan informasi yang benar dan objektif.

Strategi lainnya adalah memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi. Demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada pemilu sebagai sarana memilih pemimpin, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas melalui forum konsultasi publik, musyawarah pembangunan, dialog kebijakan, serta berbagai mekanisme partisipatif lainnya. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, rasa memiliki terhadap demokrasi akan meningkat sehingga kepercayaan terhadap sistem politik dapat dipulihkan (Hidayat, 2025).

Peran masyarakat sipil juga sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, komunitas akademik, media massa, dan organisasi profesi memiliki fungsi sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui fungsi advokasi, edukasi, dan kontrol sosial, masyarakat sipil dapat membantu memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran masyarakat sipil yang kuat juga dapat menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan negara sehingga demokrasi tidak mengalami kemunduran.

Penguatan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dialog, dan musyawarah perlu terus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Polarisasi politik yang semakin tajam dapat mengancam persatuan nasional apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu membangun budaya politik yang mengedepankan persatuan, kerja sama, dan penyelesaian konflik secara damai. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia memerlukan upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan. Penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, reformasi lembaga politik dan hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan pendidikan politik dan literasi digital, perluasan partisipasi publik, serta penguatan peran masyarakat sipil merupakan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Melalui berbagai upaya tersebut, demokrasi Indonesia diharapkan mampu berkembang tidak hanya sebagai sistem prosedural, tetapi juga sebagai sistem yang benar-benar mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan rakyat secara luas (Wasaraka, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia merupakan tantangan serius yang dapat memengaruhi kualitas dan keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan demokrasi sejak era Reformasi melalui pelaksanaan pemilu yang lebih terbuka, kebebasan berpendapat, dan meningkatnya partisipasi politik, berbagai permasalahan masih menjadi penghambat terwujudnya demokrasi yang substantif. Indikator krisis kepercayaan tersebut terlihat dari meningkatnya apatisme politik, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga negara, maraknya polarisasi sosial-politik, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan hasil-hasil demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan prosedur yang berjalan dengan baik, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap demokrasi meliputi tingginya praktik korupsi, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, penyebaran disinformasi, ketimpangan sosial-ekonomi, serta kurang optimalnya representasi aspirasi rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan memulihkan kepercayaan publik, antara lain melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, reformasi lembaga politik dan hukum, pemberantasan korupsi, penguatan pendidikan politik dan literasi digital, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dengan upaya yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen bangsa, demokrasi Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi sistem yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga memperoleh legitimasi dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alisya, T., Sygy, A. R., Rahmawati, M., & Maharani, R. S. (2025). Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Dpr Ri Dan Upaya Reformasi Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan: Studi Kasus Demonstrasi 25 Agustus–02 September 2025. *Global Research And Innovation Journal*, 1(3), 2691–2700.
- Arianto, B., Madu, L., & Anggraini, O. (2025). *Demokrasi Digital: Pendekatan Konseptual*. Jawa Kreasinografi.
- Dharmawan, R. A., Setyawan, K. G., Stiawan, A., & Imron, A. (2025). Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya). *Jurnal Dialektika Pendidikan Ips*, 5(1), 52–68.
- Esha, M. I. (2013). Kepemimpinan Di Era Demokrasi Deliberatif. *El-Qudwah*, 8(2), 123. <https://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1464/12/1464.Pdf>
- Fahir, Y. (2025). Sistem Checks And Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(6).
- Fadhurrahman, R. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3(1), 20–27.
- Ferdinan, M. A. (2025). Pancasila Sebagai Solusi Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Institusi Demokrasi Di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (Mij)*, 3, 673–678.
- Ginting, Y. E. H., Aulia, A., & Karo Karo, I. L. (2025). Kajian Yuridis Penjatuhan 17+8 Tuntutan Rakyat Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Transparansi Serta Responsivitas Pihak Yang Dituntut. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (Jipm)*, 3(6), 1156–1167.
- Hanifah, W. (2025). Pengaruh Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa Magang Di Sekretariat Jenderal Dpr Ri [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. *Repositori Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Haudhi. (2026). Penyebab Utama Korupsi Dalam Pemerintahan. *Alwaqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 5(02).
- Hidayat, R. (2025). Urgensi Penguatan Partisipasi Publik Dalam Pemilu: Peran Kpu Dan Bawaslu Dalam Konteks Demokrasi Indonesia. *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*
- Iqbal, M. A. G., Siregar, S. N., & Marpaung, D. A. (2025). Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Dpr: Urgensi Penguatan Kedudukan Wakil Rakyat Dalam Perspektif Norma Dan Konstitusi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(2), 77–83.
- Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan Politik Dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(6).
- Noviati, C. E. (2013). *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan*. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Nurhidayah, M., & Wahjono, S. I. (2025, April). Pentingnya Komunikasi Dalam Organisasi Pemerintah Di Era Keterbukaan Informasi Dan Akuntabilitas Publik [Preprint].

- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik Dan Peran Kewarganegaraan. *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442.
- Rajif Al Fatakh. (2023). Pengaruh Kepercayaan Partai Politik Terhadap Keputusan Memilih Pada Masyarakat Di Kota Malang (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Sevriandri, T. I., Situmeang, S. P., & Septiayanti, N. A. (2026). Penyalahgunaan Media Sosial Dan Tantangan Demokrasi: Urgensi Penguatan Literasi Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(4), 2651–2658.
- Soleh, A. K. (2005). Islam Dan Demokrasi. *El-Jadid: Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam*, 3(1), 111–126. <https://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/15166/>
- Sumitro, & Yorman. (2024). Legitimasi Pemerintah Dalam Perspektif Demokrasi Modern: Analisis Atas Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Politik. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(5), 243–251.
- Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi Di Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 229–246. <https://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/21048/2/21048.Pdf>
- Törnquist, O., Webster, N., & Stokke, K. (2009). *Demokrasi Di Atas Pasir: Kemajuan Dan Kemunduran Demokratisasi Di Indonesia* (D. Prabawati, D. Yanuardi, G. D. Parahita, N. Kailani, & W. P. Samadhi, Penerj.). Pcd Press & Demos.
- Wasaraka, H. (2024). Reformasi Hukum Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Sistem Demokratis. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 3(1), 8–15.
- Zikri, M., Ali, B., & Umur, A. (2025). Fenomena Money Politics dalam Pemilu Di Kabupaten Bireuen Tahun 2024: Studi Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah. *Journal Of Innovative And Creativity*, 5(2), 18208–18218